

POLA SPASIAL INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMBANGUNAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Gilang Adinugroho¹, Imam Arifa'ilah², Selvi Elvina³, Inriyatni S⁴, Aisyah T⁴
Magister Geografi, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
¹ Email : gilangadi1878@gmail.com

Diterima (received): 09 September 2016

Disetujui (accepted): 03 Oktober 2016

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara dengan beragam kondisi geografis, dari pesisir sampai pegunungan. Keragaman tersebut dapat berpengaruh terhadap proses pembangunan. Selama ini pusat pertumbuhan berada di wilayah dengan topografi datar. Pembangunan di wilayah bergunung dan berbukit menyebabkan biaya menjadi lebih mahal. Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten yang pembangunannya masih tertinggal di DIY dan Karakteristik fisiknya lebih kompleks dibandingkan daerah lain. Analisa pola spasial IKG akan memudahkan menentukan lokasi prioritas pembangunan di Gunungkidul. Tujuan dalam penelitian adalah sebagai berikut : 1) Mengidentifikasi pola spasial IKG 2) Mengidentifikasi pola spasial tingkat pembangunan desa, 3) Mengidentifikasi hubungan IKG dengan tingkat pembangunan desa di Kabupaten Gunungkidul. Penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif. Analisis pola spasial menggunakan SIG dan analisis hubungan menggunakan korelasi pearson. Indeks Kesulitan Geografis Kabupaten Gunungkidul paling tinggi dibandingkan di DIY. Hasil analisis menunjukkan bahwa 38 desa termasuk dalam klasifikasi rendah, 64 desa (sedang) dan 42 desa berklasifikasi tinggi. Desa dengan kesulitan geografis tinggi relatif banyak di bagian utara dan selatan. Indeks Pembangunan Desa Gunungkidul juga paling rendah di DIY. Desa-desa yang lebih maju berada di bagian tengah kabupaten. Hal ini dimungkinkan daerahnya yang datar, dilalui jalur strategis dan dekat dengan pusat pertumbuhan. Hasil analisis statistik menunjukkan adanya hubungan sangat kuat antara IKG dengan IPD dengan arah negatif. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin rendah nilai IKG maka semakin besar nilai IPD, begitu juga sebaliknya.

Kata Kunci : *kondisi geografis, IKG, IPD, korelasi*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman karakteristik geografis. Negara ini terdiri dari puluhan ribu pulau, puluhan gunung dan ratusan ribu kilometer garis pantai. Hal tersebut menjadi tantangan besar untuk pemerataan kegiatan pembangunan di seluruh wilayah NKRI. Karakteristik geografis yang beragam membutuhkan pendekatan yang berbeda dalam pelaksanaan pembangunan.

Pusat - pusat pertumbuhan di Inonesia sebagian besar berlokasi di dataran rendah, baik di pinggir pantai/sungai atau pedalaman. Kegiatan pembangunan lebih mudah di dataran rendah karena biaya rendah dan minim hambatan fisik.

kondisi tersebut menyebabkan sarana dan infrastruktur di dataran rendah relatif lebih lengkap dibandingkan di wilayah perbukitan atau pegunungan. Kegiatan pembangunan di wilayah pegunungan atau perbukitan membutuhkan biaya yang mahal karena hambatan fisik relatif besar. Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu kunci utama pembangunan wilayah (Muta'ali, 2014). Infrastruktur menjadi media kegiatan berbagai sektor di suatu wilayah. Ketersediaan infrastruktur akan memperlancar aksesibilitas, arus produksi dan kegiatan lainnya (Adisasmita, 2008).

Kabupaten Gunungkidul merupakan kabupaten yang pembangunannya masih tertinggal di Daerah Istimewa Yogyakarta. IPM, pertumbuhan ekonomi dan kontribusi ekonomi Gunungkidul paling rendah dibandingkan kabupaten lain di DIY. Kontribusi ekonomi kabupaten ini hanya 13,6 % padahal luas totalnya mencapai 50 % DIY (BPS, 2014). Karakteristik fisik Gunungkidul relatif lebih kompleks dibandingkan daerah yang lain. Sehingga hambatan pembangunan lebih besar. Kondisi geografis kabupaten ini dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu utara, tengah dan selatan. Bagian utara merupakan perbukitan Batur Agung menoreh dengan ketinggian 500 – 1000 meter, sedangkan bagian tengah adalah Basin Wonosari dengan topografi datar. Bagian selatan Gunungkidul merupakan perbukitan karst Gunungsewu Beragamnya karakteristik geografis berdampak terhadap perbedaan tingkat kesulitan geografis di Gunungkidul. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul harus memprioritaskan daerah yang masih tertinggal, terutama dengan kesulitan geografis yang tinggi. Analisis spasial dapat membantu identifikasi desa prioritas sehingga program pembangunan sesuai *locus* (lokasi). Perbedaan tingkat kesulitan geografis dapat berdampak terhadap tingkat perkembangan suatu wilayah.

Uraian diatas merupakan latar belakang dalam penelitian. Kajian pola spasial Indeks Kesulitan Geografis diperlukan untuk mengidentifikasi daerah yang diprioritaskan dalam pembangunan. Daerah dengan IKG tinggi akan mengalami hambatan proses pembangunan akibat konfigurasi geografisnya. Tujuan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi pola spasial Indeks Kesulitan Geografis di Kabupaten Gunungkidul.
2. Mengidentifikasi pola spasial tingkat pembangunan desa di Kabupaten Gunungkidul.
3. Mengidentifikasi hubungan Indeks Kesulitan Geografis dengan tingkat pembangunan desa di Kabupaten Gunungkidul.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian adalah desa. Terdapat 144 desa yang tersebar di 18 kecamatan di Kabupaten Gunungkidul. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu Indeks Kesulitan Geografis (IKG) dan Indeks Pembangunan Desa (IPD). Sumber data IKG berasal dari lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 tahun 2015 tentang Dana Desa. Data IPD tersebut merupakan data yang dikeluarkan oleh Bappenas dan BPS untuk mengukur pembangunan desa. Data IPD untuk provinsi DIY diolah dan

dibandingkan kondisi desa dengan mendasarkan pada 5 dimensi utama yang ada dalam IPD yaitu pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas, pelayanan umum dan pemerintahan (BPS, 2014). IPD mengklasifikasikan desa di seluruh Indonesia menjadi 3, yaitu mandiri, berkembang dan tertinggal.

Analisis pola spasial dalam tujuan pertama dan kedua menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG). Sistem Informasi Geografis merupakan sarana penting untuk mendukung analisis spasial. SIG sebagai sistem informasi berbasis komputer yang mampu mengumpulkan, menyimpan, memanipulasi dan menampilkan data spasial dengan tujuan untuk pengambilan keputusan (Kraak & Ormeling, 2007). Software yang digunakan untuk pengolahan adalah ArcGIS 9.3. klasifikasi data akan memudahkan dalam analisis pola spasial. Pemerintah belum mengeluarkan pedoman klasifikasi untuk IKG sehingga menggunakan klasifikasi dalam ArcGIS. Sistem yang digunakan dalam melakukan klasifikasi adalah *Natural Breaks*. Sistem ini melihat nilai indikator dari yang terkecil dan terbesar. Data kemudian dibagi menjadi kelas-kelas dengan batas-batas yang ditentukan berdasarkan nilai terbesar. Formula *Natural Breaks* adalah nilai terkecil – nilai tengah – nilai terbesar (Muta'ali, 2014). Klasifikasi membagi desa menjadi 3 kelompok yaitu tinggi, sedang dan rendah.

Analisis yang digunakan dalam mengidentifikasi hubungan pada tujuan ketiga adalah analisis statistik. Teknik analisis statistik yang digunakan adalah korelasi *pearson product moment*. Data IKG dan IPD termasuk dalam jenis data interval sehingga menggunakan teknik statistik tersebut (Sugiyono, 2007). Syarat lain dalam penggunaan teknik ini adalah data harus berdistribusi normal. Tabel 1 menunjukkan klasifikasi untuk interpretasi koefisien korelasi.

Tabel 1. Interpretasi koefisien korelasi

Interval	Tingkat hubungan
0,00 – 0,199	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat kuat

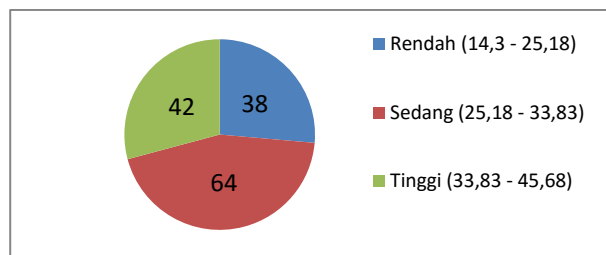
Sumber : Sugiyono, 2007

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

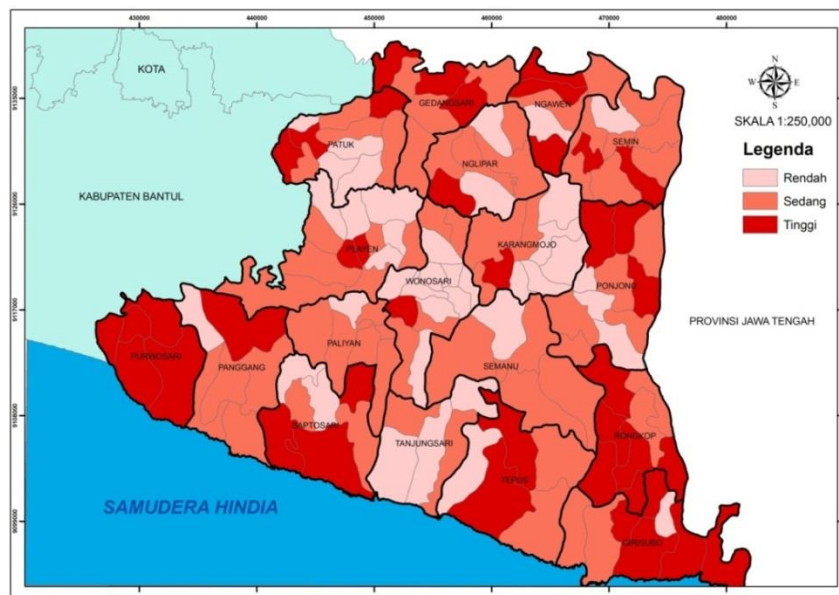
1. Pola Spasial IKG Kabupaten Gunungkidul

Indeks Kesulitan Geografis menunjukkan tingkat hambatan dalam pembangunan. Nilai IKG antara 0-100, semakin mendekati nilai 100 maka semakin tinggi hambatan untuk pembangunan. Pembahasan pola spasial IKG di Kabupaten Gunungkidul akan menunjukkan desa yang mempunyai hambatan relatif tinggi. Desa-desa tersebut harus menjadi prioritas pembangunan untuk mengurangi ketertinggalan terhadap daerah lain. Kabupaten Gunungkidul memiliki IKG tertinggi, yaitu 29,96. IKG kabupaten Kulonprogo tertinggi ke 2, dengan nilai 28,64, sedangkan Sleman menempati posisi ke 3, yaitu 26,26. Kabupaten yang mempunyai konfigurasi pegunungan dan perbukitan memiliki nilai IKG lebih tinggi dibandingkan daerah yang karakteristik geografisnya dataran rendah.

Kabupaten Gunungkidul terdiri dari 144 desa yang tersebar di 18 kecamatan. Konfigurasi geografis desa di kabupaten ini relatif beragam. Terdapat 18 desa yang berada di pesisir, 56 di pegunungan dan 70 berada di dataran rendah (BPS, 2015). Setiap konfigurasi mempunyai tingkat kesulitan geografis yang berbeda. Semakin datar suatu daerah maka semakin rendah tingkat kesulitan geografis. Desa yang memiliki nilai IKG tertinggi di Gunungkidul adalah Desa Pringombo (Kecamatan Rongkop) dan terendah di Desa Wonosari (Kecamatan Wonosari). Gambar 2 menunjukkan peta pola spasial IKG di Kabupaten Gunungkidul. Hasil analisis menunjukkan bahwa 38 desa termasuk dalam klasifikasi rendah, 64 desa (sedang) dan 42 desa berklasifikasi tinggi. Gambar 1 menunjukkan diagram jumlah desa berdasarkan klasifikasi IKG. Hal ini berarti 30 % desa di Gunungkidul memiliki tingkat kesulitan geografis yang tinggi. Gambar 2 menunjukkan bahwa desa dengan kesulitan geografis tinggi relatif banyak di bagian utara dan selatan. Bagian tengah Gunungkidul relatif banyak desa dengan tingkat kesulitan geografis yang rendah.



Gambar 1. Jumlah desa menurut klasifikasi IKG



Gambar 2. Pola spasial IKG di Gunungkidul

Pegunungan Batur Agung merupakan pegunungan yang memanjang dari Bantul sampai Klaten. Batur Agung merupakan hasil dari proses tektonik yang ada di Kali Opak (Santoso & Adji, 2014). Topografi Pegunungan Batur Agung

adalah miring dan terjal dengan tingkat kelerengan mencapai 30 – 45 % atau bahkan > 45 % (Santoso & Adji, 2014). Wilayah ini mempunyai lapisan tanah yang tipis dan minum air tanah. Hal tersebut membuat tanah di pegunungan ini sangat marjinal sehingga sulit untuk dibudidayakan. Perbukitan karst di Gunungkidul termasuk dalam rangkaian Geopark Gunung Sewu yang meliputi 3 kabupaten dan 3 provinsi. Geopark Gunung Sewu termasuk dalam salah satu warisan dunia oleh UNESCO. Perbukitan ini meliputi Kabupaten Gunungkidul, Wonogiri (Jawa Tengah), dan Pacitan (Jawa Timur). Karakteristik karst adalah berbukit dengan lerang yang curam. Terdapat kenampakan lembah diantara bukit-bukit karst. Kemiringan lerengnya relatif curam dan terjal yaitu antara 20-45 %. Lapisan tanah di perbukitan karst sangat tipis dan minim air tanah akan tetapi menyimpan potensi air bawah tanah (Santoso & Adji, 2014). Bagian tengah Gunungkidul adalah lembah antara perbukitan dan pegunungan yaitu Basin Wonosari. Topografi Basin Wonosari relatif datar dan landai, dengan kemiringan lereng 15-25 %.

Wilayah yang memiliki nilai IKG rendah memiliki pola spasial berada di bagian tengah, dilewati jalan arteri, dan ibukota kecamatan. Hal tersebut membuat daerah yang mempunyai akses lebih baik maka hambatan pembangunannya semakin rendah. Bagian tengah Wonosari memiliki topografi landai/datar sehingga pembangunan sarana prasarana lebih mudah dan berbiaya murah. Hal ini membuat ketersediaan sarana prasarana relatif lengkap dan bervariasi. Kecamatan yang terletak di bagian tengah antara lain Playen, Patuk Wonosari, atau Karangmojo. Desa Wonosari memiliki nilai IKG terendah di Gunungkidul. Desa ini merupakan lokasi Ibukota Kabupaten Gunungkidul sehingga aksesibilitasnya relatif mudah. Ketersediaan sarana prasarananya paling lengkap di seluruh Kabupaten Gunungkidul karena skala pelayanannya mencakup seluruh daerah. Desa Wonosari berada di lokasi strategis sehingga dilewati berbagai sarana transportasi. Aksesibilitas dan transportasi yang mudah serta sarana yang lengkap mengurangi hambatan geografis dalam proses pembangunan. Sebagian besar Ibukota Kecamatan memiliki hambatan geografis yang rendah seperti Kepek (Saptosari), Karangmojo (Karangmojo), Nglipar (Nglipar) atau Semanu (Semanu). Pembangunan desa yang berfungsi sebagai ibukota kecamatan lebih berkembang dan mendapat perhatian lebih dibandingkan desa lain dalam satu kecamatan. Sistem transportasinya di desa-desa tersebut sudah terhubung dengan ibukota kecamatan lain. Status jalan yang menghubungkan antar kecamatan adalah level arteri dan kolektor. Ketersediaan sarana di desa ibukota kecamatan lebih lengkap karena untuk melayani kegiatan se-kecamatan. Hal tersebut menyebabkan indeks kesulitan geografisnya rendah. Gambar 3 menunjukkan infrastruktur jalan di desa dengan kesulitan geografis yang rendah.

Desa yang memiliki trigger pertumbuhan juga mempunyai nilai IKG rendah. Desa Kemadang merupakan lokasi dari obyek wisata Pantai Baron. Pantai Baron merupakan salah satu andalan Pendapatan Asli Daerah bagi Kabupaten Gunungkidul. setiap tahun ratusan ribu wisatawan mengunjungi pantai ini. Desa Kemadang memiliki fungsi yang strategis sehingga menjadi salah satu prioritas pembangunan. Kondisi tersebut membuat akses dan transportasi ke Desa Kemadang relatif mudah. Sarana yang terdapat di Desa Kemadang juga relatif

lengkap untuk melayani wisatawan yang berkunjung. Desa- desa yang dilewati jalur arteri seperti jalur Wonosari-Wonogiri dan lintas selatan mempunyai IKG yang rendah. Jalan arteri tersebut membuat akses di desa-desa tersebut lebih mudah. Pembangunan jalan memicu munculnya fasilitas umum. Jalur transportasi, terutama jalan raya menjadi salah satu *trigger* pembangunan suatu daerah.



Gambar 3. Atas : jalan lintas selatan, bawah : jalan menuju Wonosari
Sumber : dolanotomotif.com, sunoracle-ngegeretkoper.blogspot.com.

Desa-desa yang memiliki nilai IKG tinggi berada di bagian utara dan selatan Gunungkidul, bahkan semua desa di Kecamatan Purwosari memiliki klasifikasi tinggi. Karakteristik fisik yang kompleks serta minimnya *trigger* pertumbuhan membuat hambatan pembangunan relatif tinggi. Topografi yang berbukit dan bergunung membuat proses pembangunan infrastruktur membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang mahal. Jenis batuan pembentuk pegunungan struktural dan perbukitan karst yang relatif keras menambah hambatan dalam pembangunan. Sebagian besar desa dengan nilai IKG tinggi letaknya relatif jauh dari ibukota kecamatan atau ibukota kabupaten. Jarak yang jauh membuat aksesibilitas ke pusat relatif sehingga interaksi dengan pusat rendah (Kurnia, 2009). Hal ini sesuai dengan hukum geografi I bahwa setiap wilayah akan berinteraksi tetapi wilayah yang berdekatan mempunyai interaksi paling tinggi. Masyarakat harus menempuh belasan bahkan puluhan kilometer untuk mencapai pusat kecamatan atau Wonosari. Hal ini membutuhkan waktu yang lama dan biaya transportasi tinggi. Kondisi ini kurang mendukung pembangunan yang efektif dan efisien. Rendahnya aksesibilitas diperparah dengan kualitas dan kuantitas jalan di beberapa desa pedalaman. Banyak jalan masih berupa tanah atau hanya diperkeras dengan batuan. Gambar 4 menunjukkan kondisi jalan dan proses pembangunan jalan di Gunungkidul.

Sarana prasarana di desa dengan IKG tinggi masih minim dikarenakan kondisi geografis menjadi penghambat proses pembangunan. Kegiatan pembangunan membutuhkan dana dan waktu yang lebih banyak karena adanya hambatan. Salah satunya terlihat dalam gambar 5 (bawah), pembangunan jalan di bagian selatan harus memotong bukit. Batuan yang membentuk pegunungan Batur Agung dan perbukitan Karst Gunung Sewu relatif tebal. Kondisi tersebut menyebabkan perlu alat khusus untuk menanganinya. Alasan tersebut dimungkinkan menjadi salah satu faktor minimnya sarana prasarana di desa dengan IKG tinggi. permasalahan lain dalam pembangunan sarana prasarana adalah pola permukiman yang menyebar (Ritohardoyo, 2007). Jarak antar perkampungan di Gunungkidul relatif

jauh. Hal tersebut akan membutuhkan biaya tinggi untuk penyediaan sarana prasarana. Panjang jaringan dan jumlah alat yang dibutuhkan lebih banyak dibandingkan membangun di wilayah yang pola permukimanya mengelompok. Kondisi ini menyebabkan beberapa desa belum menikmati berbagai pelayanan publik.

Sarana transportasi di desa dengan IKG tinggi sangat minim. Hal ini disebabkan oleh rendahnya bangkitan penumpang akibat jumlah penduduk yang sedikit serta belum ada *trigger* pembangunan. masyarakat mengandalkan kendaraan pribadi atau angkutan informal untuk melakukan perjalanan. Angkutan transportasi umum di Gunungkidul hanya tersedia di Perkotaan Wonosari. Rute maksimal angkutan hanya sampai ibukota kecamatan. Kondisi tersebut membuat masyarakat tidak mempunyai banyak pilihan dalam akses transportasi. Kegiatan produksi dan distribusi akan terganggu akibat minimnya sarana transportasi. Jaringan transportasi menjadi penting dalam pembangunan di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang luas (50% dari luas total DIY). Jaringan transportasi merupakan salah satu pemicu perkembangan kegiatan ekonomi di daerah (Kuncoro, 2014). Jaringan transportasi akan melancarkan interaksi antar wilayah. interaksi wilayah merupakan salah satu faktor dalam pembangunan (Adisasmita, 2008). Semakin tinggi intensitas interaksi dengan pusat pertumbuhan dan wilayah lain maka perkembangan semakin cepat. Desa-desa di bagian selatan dan utara harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan di Gunungkidul. Pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi dan infrastruktur menjadi aspek penting untuk dilakukan. Hal tersebut akan mendukung aksesibilitas sehingga kegiatan ekonomi masyarakat dapat berkembang.



Gambar 4. Atas : Kondisi jalan bawah : proses pemotongan bukit
Sumber : sorotgunungkidul.com dan eanindya.com

2. Pola Spasial Tingkat Pembangunan Desa di Gunungkidul

Bappenas dan Badan Pusat Statistik mengeluarkan Indeks Pembangunan Desa sebagai instrumen evaluasi kondisi pembangunan. Desa menjadi salah satu perhatian utama pembangunan dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal ini untuk mengurangi kesenjangan antara desa dengan kota. Indeks Pembangunan Desa di Gunungkidul masih relatif tertinggal dibandingkan kabupaten lain. Gambar 5 merupakan grafik IPD tiap kabupaten di DIY.

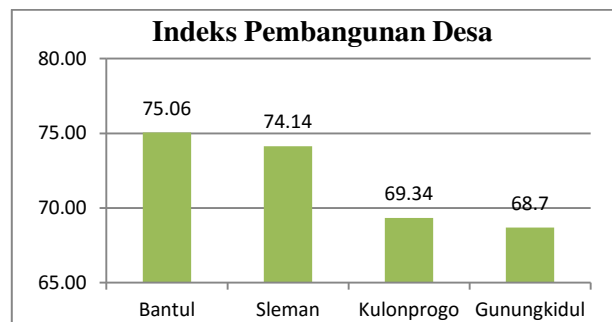
Indeks Pembangunan Desa Kabupaten Gunungkidul terendah dibandingkan daerah lain. Gambar 5 menunjukkan terdapat perbandingan relatif besar antar pembangunan desa di Kabupaten Sleman dan Bantul dengan Gunungkidul dan

Kulonprogo. Kabupaten Sleman dan Bantul memiliki konfigurasi geografis yang relatif beragam sehingga pengembangannya lebih mudah. Konfigurasi geografis Kabupaten Gunungkidul dan Kulonprogo lebih kompleks sehingga hambatannya relatif besar. Jarak 2 kabupaten tersebut dengan pusat kota juga relatif jauh serta minim *trigger* pertumbuhan. Hal tersebut dimungkinkan menjadi penyebab ketertinggalan pembangunan desa. Gambar 6 menunjukkan peta persebaran indeks pembangunan desa di Kabupaten Gunungkidul. Hasil analisis pola spasial menunjukkan bahwa desa mandiri di Gunungkidul mengelompok di bagian tengah. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan desa di bagian tengah relatif lebih maju dibandingkan bagian utara dan selatan. Desa mandiri di bagian utara dan selatan berasosiasi dengan jaringan jalan yang strategis (jalan status nasional dan provinsi) dan memiliki pusat pertumbuhan.

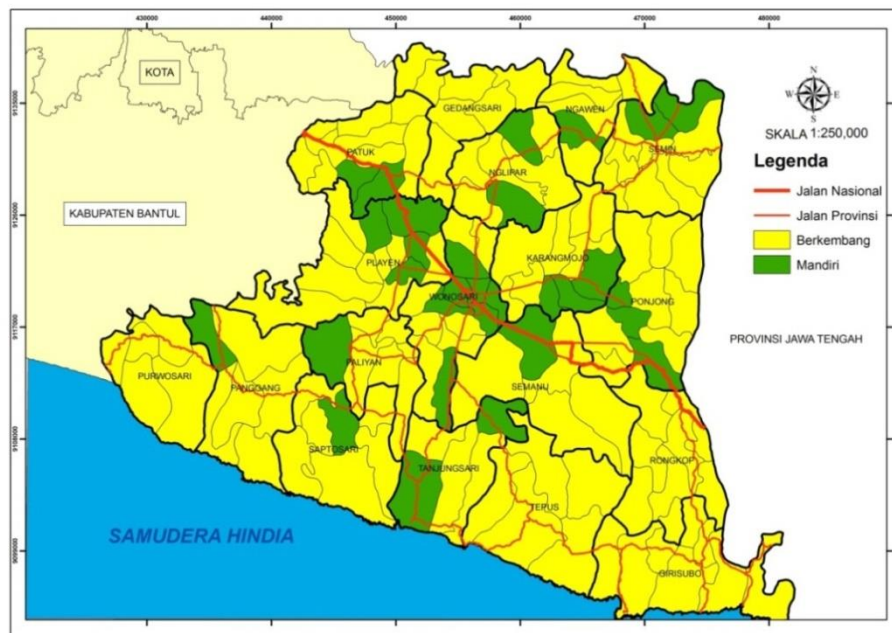
Desa-desanya di Kecamatan Wonosari, Patuk, Karangmojo dan Semanu relatif banyak yang termasuk dalam klasifikasi mandiri. Desa Kepek memiliki nilai IPD tertinggi yaitu 87,14. Desa ini berlokasi di wilayah perkotaan Wonosari. Lokasi yang strategis dan memiliki lingkup pelayanan luas membuat kegiatan ekonomi di daerah ini paling berkembang. Infrastruktur di Desa Kepek relatif lengkap karena menjadi pusat kegiatan untuk seluruh kabupaten. Aksesibilitas menuju Kepek juga relatif mudah karena dilewati jalan arteri (Wonosari-Wonogiri). Desa-desanya lain di Kecamatan Wonosari juga termasuk dalam klasifikasi mandiri. Lokasi yang berdekatan dengan pusat pertumbuhan membuat pembangunan juga ikut berkembang. Perkembangan desa-desanya di bagian tengah Gunungkidul lebih tinggi karena kondisi geografis yang mendukung. Bagian tengah merupakan dataran antar lembah atau Basin Wonosari sehingga topografinya datar dan landai. Hambatan geografis rendah sehingga mempermudah proses pembangunan. Bagian tengah Gunungkidul dilewati oleh jalan arteri sehingga aksesibilitasnya relatif mudah. Kemudahan tersebut membuat kegiatan ekonomi dan permukiman masyarakat lebih cepat berkembang. Beberapa desa yang berklasifikasi mandiri memiliki status sebagai ibukota kecamatan seperti Playen, Nglipar, Patuk, Semanu, Giriharjo, Ponjong dan Wonosari. Ibukota kecamatan mempunyai fasilitas yang relatif lengkap karena fungsinya sebagai pusat wilayah. Aksesibilitasnya relatif mudah karena sudah terhubung oleh jalan antar wilayah. Hal ini mendukung perkembangan desa yang berstatus sebagai Ibukota Kecamatan. Desa Kemadang merupakan satu-satunya desa pesisir yang masuk klasifikasi mandiri. Terdapat pusat pertumbuhan di desa tersebut yaitu Pantai Baron. Baron merupakan salah satu objek wisata andalan bagi Gunungkidul bahkan DIY. Pantai Baron merupakan salah satu penyumbang PAD tertinggi bagi kabupaten. Setiap tahun ratusan ribu wisatawan mengunjungi pantai ini. Kondisi tersebut memicu perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga pembangunan Desa Kemadang relatif maju dibandingkan desa pesisir lainnya.

Desa yang termasuk dalam klasifikasi berkembang sebagian besar terletak di bagian utara dan selatan Gunungkidul. Bagian tersebut memiliki konfigurasi geografis perbukitan dan pegunungan. Hal ini membuat pembangunan tidak semudah dibandingkan bagian tengah. Desa Pringombo Kecamatan Rongkop mempunyai nilai pembangunan desa terendah se-Kabupaten Gunungkidul. Lokasi Pringombo berada di sudut tenggara Gunungkidul sehingga jauh dari Ibukota

Kabupaten (36 km) dan Kecamatan (3 km). Desa ini juga tidak dilewati oleh angkutan umum. Kualitas dan aksesibilitas jalan di desa ini relatif baik karena sebagian besar sudah diaspal, akan tetapi minim *trigger* pertumbuhan. Kondisi tersebut membuat perkembangan Desa Pringombo paling rendah. Pembangunan di wilayah perbukitan dan pegunungan relatif tertinggal karena proses pembangunan terhambat kondisi geografis. Hal ini menyulitkan dalam pembangunan infrastruktur, jaringan transportasi dan lainnya. Pola permukiman di Gunungkidul bagian utara dan selatan yang menyebar menambah persoalan. Kondisi tersebut berdampak terhadap jumlah sarana atau jaringan yang harus dibangun. Jumlah sarana dan jaringan yang harus dibangun lebih banyak dibandingkan di pola permukiman yang mengelompok.



Gambar 5. IPD kabupaten di DIY tahun 2014



Gambar 6. Pola spasial IPD Kabupaten Gunungkidul

Sebagian besar desa yang masih berkembang mempunyai jarak yang relatif jauh dengan pusat pertumbuhan. Teori menyatakan bahwa semakin dekat suatu daerah dengan pusat pertumbuhan maka akan lebih mudah berkembang (Muta'ali, 2014). Desa-desa di Kecamatan Saptosari, Girisubo, Rongkop, dan Purwosari berjarak puluhan kilometer dari Wonosari. Minimnya pusat pertumbuhan di

Gunungkidul membuat desa-desa di luar wonosari relatif masih tertinggal pembangunannya. Desa yang terjauh dengan Wonosari adalah Songbayu di Kecamatan Girisubo yaitu berjarak 60 km (BPS, 2015). Jarak yang jauh membuat tidak terdapat *trickle down effect* dari pusat pertumbuhan. Gunungkidul seharusnya memiliki beberapa pusat pertumbuhan, tidak hanya terpusat di Wonosari. Hal ini agar perkembangan desa lebih merata di seluruh kabupaten. Pemerintah daerah harus menumbuhkan beberapa pusat baru untuk pemerataan pembangunan di Gunungkidul. dimensi Infrastruktur menjadi masalah utama dalam pembangunan desa di Gunungkidul. Beberapa desa masih memiliki infrastruktur yang minim. Infastruktur tersebut antara lain bank, hotel, pasar, pertokoan dan agen LPG. Infrastruktur tersebut bersifat komersial sehingga terkait dengan tingkat perkembangan desa. Jumlah penduduk yang relatif sedikit dengan tidak memenuhi persyaratan ekonomis untuk pendirian fasilitas-fasilitas tersebut. Bank di Gunungkidul hanya di Wonosari dan ibukota kecamatan. Bank yang ada di ibukota kecamatan hanya Bank BRI. Hotel hanya ada di 4 kecamatan yaitu Wonosari, Tepus, Tanjungsari dan Purwosari. Infrastruktur yang kurang lengkap berdampak terhadap ketertarikan investor untuk menanamkan modal di suatu daerah. Sektor yang berpotensi menjadi *trigger* pertumbuhan adalah pariwisata. Potensi ini harus didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai. Hal ini untuk mendukung kegiatan pariwisata agar terus berkembang pesat. Perkembangan tersebut dapat berdampak terhadap pembangunan di wilayah sekitar. infrastruktur air bersih di Gunungkidul juga menjadi salah satu masalah. Air bersih di kabupaten ini berupa aliran sungai bawah tanah sehingga pemanfaatannya harus menggunakan teknologi tertentu. Teknologi tersebut relatif mahal sehingga jaringan air bersih masih belum menjangkau semua masyarakat.

3. Hubungan Indeks Kesulitan Geografis dengan Pembangunan Desa

Komponen dalam penentuan IKG adalah aksesibilitas, infrastruktur dan transportasi. 3 komponen tersebut merupakan salah satu pendorong pembangunan suatu wilayah. Daerah yang aksesibilitasnya mudah, infrastrukturnya dan transportasinya baik akan lebih mudah berkembang. Analisis akan menghubungkan antara Indeks Kesulitan Geografis dengan Indeks Pembangunan Desa (IPD). Analisis hubungan antara IKG dengan IPD menggunakan analisis statistik korelasi *pearson product moment*. Perhitungan statistik korelasi menggunakan software SPSS. Salah satu syarat analisis korelasi pearson adalah data yang digunakan harus berdistribusi normal (Sugiyono, 2007). Tes Normalitas data menggunakan metode Kolmogorov Smirnov. Tabel 2 menunjukkan analisis hasil Kolmogorov Smirnov.

Tabel 2. Analisis normalitas data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
		IKG	IPD
N		144	144
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	29.9618	68.7011
	Std. Deviation	6.78392	6.92791

Most Extreme Differences	Absolute	.046	.041
	Positive	.046	.038
	Negative	-.035	-.041
Kolmogorov-Smirnov Z		.550	.498
Asymp. Sig. (2-tailed)		.923	.965
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			

Sumber : Hasil Analisis tahun 2016

Hal yang perlu diperhatikan adalah nilai Sig (kolom merah) untuk penentuan normalitas suatu data. Nilai Sig < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal dan nilai Sig > 0,05 maka data berdistribusi normal. nilai Sig IKG sebesar 0,923 dan IPD sebesar 0,965 sehingga > 0,05. Nilai tersebut menunjukkan bahwa data IKG dan IPD berdistribusi normal sehingga dapat digunakan untuk analisis korelasi. Normalitas data menunjukkan bahwa tidak ada data ekstrim (terlalu tinggi atau rendah). Analisis korelasi yang menggunakan data tidak berdistribusi normal akan mempengaruhi hasil. Hasil yang tidak sesuai akan berdampak terhadap pengambilan kesimpulan suatu penelitian. Tabel 3 menunjukkan hasil analisis korelasi antara IKG dengan IPD.

Tabel 3. Analisis korelasi *pearson*
Correlations

	IKG	IPD
Pearson Correlation	1	-.919**
IKG Sig. (2-tailed)		.000
N	144	144
Pearson Correlation	-.919**	1
IPD Sig. (2-tailed)	.000	
N	144	144

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Hasil analisis tahun 2016

Identifikasi pertama adalah melihat nilai signifikansi. Nilai signifikansi < derajat kesalahan (0,05) maka terdapat hubungan yang signifikan apabila nilainya > derajat kesalahan maka tidak ada signifikansi. Hasil perhitungan apabila menunjukkan tidak ada signifikansi maka tidak dapat dilanjutkan analisis korelasinya. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa ada signifikansi antara IKG dan IPD karena nilai sig < 0,05 yaitu 0,000. Kolom *pearson correlation* (kolom merah pada tabel) menunjukkan tingkat hubungan antar variabel. Arah korelasi antara IKG dengan IPD adalah negatif. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin rendah nilai IKG maka semakin besar nilai IPD, begitu juga sebaliknya. Nilai *pearson correlation* antara IKG dan IPD sebesar 0,919 atau sangat kuat. Hasil akhirnya adalah ada hubungan sangat kuat antara Indeks Kesulitan Geografis

dengan Indeks Pembangunan Desa dengan arah negatif. Tabel 3 menunjukkan nilai IPD dari 5 desa dengan nilai IKG terendah dan tertinggi.

Tabel 4. Nilai IPD desa dengan IKG terendah dan tertinggi

Desa	Kecamatan	IKG	IPD
5 desa dengan IKG terendah			
Wonosari	Wonosari	14,30	85,76
Piyaman	Wonosari	15,79	83,12
Kepek	Wonosari	16,36	87,14
Bandung	Playen	17,52	78,48
Kelor	Karangmojo	18,10	75,38
5 desa dengan IKG tertinggi			
Sawahan	Ponjong	42,31	54,73
Salam	Patuk	42,52	61,68
Ngunut	Playen	44,88	56,44
Giriasih	Purwosari	45,44	54,24
Pringombo	Rongkop	45,68	51,68

*nilai IPD 0-100, semakin tinggi maka semakin maju pembangunan

Sumber : IPD dan hasil analisis tahun 2016

Desa- desa yang memiliki kesulitan geografis yang rendah mempunyai tingkat pembangunan desa yang tinggi. desa Kepek di Kecamatan Wonosari memiliki nilai IKG terendah no 3 dan nilai IPD tertinggi seKabupaten Gunungkidul. desa yang mempunyai kesulitan geografis tinggi, tingkat pembangunannya relatif masih tertinggal. Desa Pringombo memiliki nilai IKG dan IPD terendah di Gunungkidul. data tersebut menunjukkan adanya hubungan berbanding terbalik antara Indeks Kesulitan Geografis dengan tingkat pembangunan desa. Semakin mudah aksesibilitas menuju ke suatu tempat maka daya tarik ekonominya tempat tersebut semakin kuat (Hadjisarosa dalam Adisasmita, 2008).

D. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Indeks Kesulitan Geografis Gunungkidul tertinggi di DIY. Desa yang berada di bagian utara dan selatan memiliki nilai IKG lebih tinggi dibandingkan bagian tengah. Bagian utara dan selatan mempunyai konfigurasi geografis perbukitan dan pegunungan. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul diharapkan memberikan prioritas pembangunan di bagian utara dan selatan yang memiliki kesulitan geografis tinggi.
2. Indeks Pembangunan Desa Gunungkidul terendah di DIY. Desa di bagian tengah lebih berkembang dibandingkan desa di bagian utara dan selatan. Konfigurasi geografis yang landai, dekat dengan pusat pertumbuhan dan infrastruktur yang lengkap mendukung perkembangan desa di bagian tengah Gunungkidul.
3. Terdapat hubungan sangat kuat antara IKG dengan IPD dengan arah negatif. Semakin rendah nilai IKG maka semakin tinggi nilai IPD. Semakin rendah kesulitan geografis maka kegiatan pembangunan berjalan dengan relatif cepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2008). *Pengembangan Wilayah : Konsep dan Teori*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- BPS. (2014). *Indeks Pembangunan Desa*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2015). *Kabupaten Gunungkidul dalam Angka Tahun 2015*. Wonosari: Badan Pusat Statistik.
- Kraak, M. J., & Ormeling, F. (2007). *Kartografi, Visualisasi Data Geospasial*. Yogyakarta: UGM Press.
- Kuncoro, M. (2014). *Pembangunan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kurnia, D. (2009). *Strategi Pengembangan Wilayah Perbatasan Antarnegara : Memacu Pertumbuhan Ekonomi Entikong Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat*. Semarang: Tesis : Universitas Diponegoro.
- Muta'ali, L. (2014). *Kapita Selekta Pembangunan Wilayah*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi UGM.
- Muta'ali, L. (2014). *Teknik Analisis Regional*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi UGM.
- Ritohardoyo, S. (2007). Perubahan Permukiman Perdesaan Pesisir Kabupaten Gunungkidul DIY Tahun 1996-2003. *Forum Geografi*, 23-33.
- Santoso, L. W., & Adji, T. N. (2014). *Karakteristik Ekuifer dan Potensi Air Tanah Graben Bantul*. Yogyakarta: UGM Press.
- Sugiyono. (2007). *Statistik untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.